

Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan Di Indonesia

Lia Wulandari, Restu Rahmawati, Hesti Rosdiana

Program Studi Ilmu Politik FISIP UPNVJ

email: lia.wulandari@upnvj.ac.id, restu.rahmawati@upnvj.ac.id, hesti.rosdiana@upnvj.ac.id



INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article

Kata Kunci:

Kuota Perempuan;

Gender;

Politik;

Article History

Dikirim: 13 Juni, 2023;

Diterima: 11 Juli, 2023;

Dipublikasi: 03 Agustus 2023;

ABSTRAK

Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perempuan di Indonesia mencapai jabatan terpilih di tingkat provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya akses ke sumber daya keuangan, politik internal partai, dan status perkawinan perempuan dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk mencapai jabatan terpilih. Namun, akses ke jaringan sosial dan politik yang memberi wanita sumber daya utama, milik agama yang dominan di wilayah Anda, dan usia membawa wanita ke kesuksesan politik yang lebih besar. Temuan ini didasarkan pada interpretasi korelasi statistik dan hasil analisis konten dari wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan temuan dan rekomendasi berbasis bukti, yang dapat digunakan untuk meningkatkan elektabilitas kandidat politik perempuan dalam pemilu.

ABSTRACT

This study identifies the factors that prevent women in Indonesia from achieving elected office in the provincial level in Indonesia. The results showed that lack of access to financial resources, internal party politics, and women's marital status can be barriers to women achieving elected office. However, access to social and political networks that provide women with key resources, belonging to the dominant religion in your region, and age lead women to greater political success. These findings are based on the interpretation of statistical correlations and content analysis results from in-depth interviews and focus group discussions. The aim of this research is to provide evidence-based findings and

recommendations, which can be used to increase the electability of women political candidates in elections.

Pendahuluan

Berdasarkan hasil Pemilu 2014 dan 2019 di Indonesia, tiga hambatan yang paling integral terhadap rendahnya keterwakilan politik perempuan adalah hambatan masuk, hambatan daya saing pemilu, dan hambatan keterwakilan substantif. Perempuan masih berjuang untuk mengatasi hambatan yang diciptakan oleh pengalaman politik yang tidak memadai dan budaya patriarki yang kuat di Indonesia. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kurangnya partisipasi dan keterwakilan perempuan membuat kampanye di masa depan menjadi lebih sulit bagi perempuan. Bahkan kandidat perempuan yang berhasil pun masih menghadapi tantangan dalam distribusi geografis daerah pemilihan, persepsi yang kurang baik terhadap kandidat perempuan di kalangan pemilih dan partai politik, serta kurangnya dana kampanye.

Secara umum, partai politik adalah penjaga gerbang partisipasi politik perempuan, dan mereka mencapainya dengan berbagai cara, termasuk dengan membentuk dan menginstrumentalisasi sayap perempuan. Beberapa kandidat merasa netral hingga positif terhadap sayap perempuan partai mereka, tetapi banyak yang merasa bahwa sayap perempuan mengesampingkan perempuan dan, meskipun secara teoritis mendukung partisipasi perempuan, pada kenyataannya mengharuskan perempuan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengadvokasi partai mereka atau kolega laki-laki mereka daripada diri mereka sendiri.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pemilu perempuan sangat beragam dan kompleks, dengan variasi yang signifikan berdasarkan struktur partai lokal, ekonomi lokal, dan norma-norma budaya lokal. Oleh karena itu, penelitian terhadap faktor-faktor spesifik yang berdampak pada kandidat perempuan di berbagai daerah akan memungkinkan para pendukung keterwakilan politik perempuan untuk mengatasi atau melemahkan hambatan-hambatan tersebut sebelum pemilu nasional Indonesia tahun 2024.

Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perempuan di Indonesia untuk mencapai jabatan terpilih di bawah tingkat provinsi, dengan fokus pada tiga provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sumatera Utara. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa kurangnya akses terhadap sumber daya keuangan, politik internal partai, dan status pernikahan perempuan dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk mencapai jabatan terpilih. Namun, akses terhadap jaringan sosial dan politik yang menyediakan sumber daya utama bagi perempuan, menjadi bagian dari agama yang dominan di wilayah, dan usia membawa perempuan pada kesuksesan politik yang lebih besar. Temuan ini didasarkan pada interpretasi korelasi statistik dan hasil analisis konten dari wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan temuan dan rekomendasi berbasis bukti, yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterpilihan kandidat politik perempuan dalam pemilu.

Tinjauan Pustaka

Kajian literatur mengungkapkan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang menghambat representasi politik perempuan seperti status sosial ekonomi dan ekspektasi gender. Penelitian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mendukung struktur kekuasaan institusional yang ada, seperti kekuatan finansial, politik, dan jaringan, yang biasanya lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan (Aspinall, White, and Savirani, 2021) Oleh karena itu, laki-laki lebih cenderung memiliki kesuksesan dalam pemilihan umum dibandingkan perempuan, dan kekayaan serta koneksi keluarga dalam politik sangat menentukan akses ke kekuasaan politik. Partai politik juga memainkan peran penting dalam menentukan kandidat mana yang berhasil (Prihatini, 2019). Selain itu juga ada kampanye politik yang dilakukan pada pemilu lebih banyak dalam skala nasional atau provinsi daripada lokal Perdana, and Hillman (2020). Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan representasi elektoral perempuan harus datang dari mengkooptasi struktur kekuasaan ini atau bermitra dengan mereka. Terlepas dari rintangan-

rintangan ini, penelitian yang ada menunjukkan bahwa representasi politik perempuan dalam politik secara bertahap meningkat sejak demokrasi diperkenalkan kembali pada akhir tahun 1990-an. Kuota kandidat politik yang diterapkan pada tahun 2004 telah meningkatkan angka-angka ini dan meningkatkan keanggotaan perempuan di kantor legislatif secara keseluruhan (Prihatini, 2019). Namun, kuota ini sebagian besar menguntungkan perempuan elit, terutama mereka yang memiliki akses terhadap kekayaan dan anggota keluarga di dunia politik. Norma-norma gender dan taktik-taktik eksklusif masih membatasi kampanye perempuan elit dan non-elit. Perempuan Indonesia telah mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam politik elektoral, tetapi keberhasilan tersebut tidak dialokasikan secara proporsional, sehingga penelitian ini bertujuan untuk membantu menginformasikan inisiatif di masa depan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan perempuan dalam pemilu secara keseluruhan dan mendistribusikan kembali keberhasilan tersebut kepada lebih banyak perempuan.

Penelitian menunjukkan bahwa pemilu di Indonesia sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan institusional yang ada, termasuk: kekuasaan finansial, yaitu akses terhadap kekayaan dan kredit; kekuasaan politik, yaitu posisi di partai atau pemerintahan, atau koneksi dengan mereka yang memiliki posisi di partai atau pemerintahan; kekuasaan sosial, yaitu ketokohan dan pengaruh di jaringan sosial lokal, termasuk jaringan desa dan jaringan yang berbasis di lembaga keagamaan (Wieringa, 2006). Namun, variasi yang signifikan dalam struktur kekuasaan di berbagai daerah berarti bahwa metode untuk mempengaruhi mereka harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Sejarah Indonesia yang patriarkis membuat laki-laki umumnya memiliki pengaruh finansial, politik, dan sosial yang lebih besar, sehingga mereka lebih berpeluang meraih jabatan. Perempuan dengan tingkat kekuatan finansial, politik, atau sosial yang tidak biasa terkadang dapat mengatasi hambatan ini, tetapi penelitian yang ada menunjukkan bahwa perempuan yang tidak memiliki kelebihan tersebut kesulitan untuk meraih kesuksesan dalam pemilu. Penelitian ini juga mengeksplorasi sejumlah mekanisme terbatas yang memengaruhi kekayaan dan norma gender

politisi perempuan, seperti kemampuan untuk membelanjakan uang dalam jumlah besar untuk iklan atau pembelian suara, atau kepatuhan seseorang terhadap peran gender dalam Islam yang didefinisikan secara sempit. Kedua mekanisme tersebut tidak terlalu berdampak dalam kampanye lokal (Wieringa,2006). Sebagai contoh, dalam kampanye yang lebih kecil, iklan tidak terlalu diperlukan ketika kampanye di daerah dengan mayoritas pemilih secara langsung, dan memproyeksikan citra perempuan Islam yang spesifik menjadi kurang penting ketika berkampanye di daerah pedesaan di mana Islam yang dianut lebih bersifat lebih kental, atau di mana Islam sama sekali tidak dominan (Bayo, 2021)

Selain itu, penelitian yang ada berfokus secara tidak proporsional pada kampanye di tingkat provinsi atau nasional, bukan di tingkat lokal. Penelitian ini juga mengeksplorasi sejumlah mekanisme terbatas yang memengaruhi kekayaan dan norma gender pada politisi perempuan, seperti kemampuan untuk membelanjakan uang dalam jumlah besar untuk iklan atau membeli suara, atau kepatuhan seseorang terhadap peran gender Islam yang didefinisikan secara sempit. Kedua mekanisme tersebut tidak akan terlalu berdampak pada kampanye lokal. Sebagai contoh, dalam kampanye yang lebih kecil, iklan tidak terlalu diperlukan ketika Anda dapat mengunjungi mayoritas pemilih secara langsung, dan memproyeksikan citra perempuan Islam yang spesifik menjadi kurang penting ketika berkampanye di daerah pedesaan di mana Islam yang dianut mayoritas, atau di mana Islam sama sekali tidak dominan. Karena alasan-alasan tersebut, penelitian ini melihat mekanisme lain yang digunakan untuk melihat bagaimana kekayaan dan norma-norma gender memengaruhi kehidupan perempuan, termasuk kewajiban pengasuhan anak, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan banyak lagi. Namun, ini bukan satu-satunya cara di mana masalah kekayaan dan gender dapat memengaruhi politisi perempuan. Partai politik juga berperan sebagai mediator antara perempuan dan jabatan politik.

Partai politik bukan hanya manifestasi dari kekuatan politik, tetapi juga merupakan partisipan aktif dalam proses yang memiliki dampak besar pada apakah perempuan dapat mencapai jabatan atau tidak. Daerah pemilihan, sumber daya kampanye, dan posisi kandidat dalam

daftar pemilih terbuka di Indonesia semuanya ditentukan oleh partai politik. Hal ini berarti bahwa membentuk kembali hubungan perempuan dengan partai mereka dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap nasib politik mereka. Namun, struktur dan efektivitas partai politik sangat bervariasi, sehingga diperlukan lebih banyak penelitian untuk menilai bagaimana berbagai partai lokal berinteraksi dengan kandidat perempuan mereka. Terlepas dari rintangan-rintangan ini, penelitian yang ada menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam politik secara bertahap meningkat sejak demokrasi diperkenalkan kembali pada akhir tahun 1990-an, membuktikan bahwa sistem ini tidak terlalu kaku untuk berubah. Kuota kandidat politik yang diterapkan pada tahun 2004 telah meningkatkan angka-angka ini dan meningkatkan kehadiran perempuan di lembaga legislatif secara keseluruhan (Prihatini, 2019).

Namun, kuota ini sebagian besar menguntungkan perempuan elit, terutama mereka yang memiliki akses terhadap kekayaan dan anggota keluarga di dunia politik. Norma-norma gender dan strategi yang eksklusif masih membatasi kampanye kandidat perempuan yang berasal dari elit partai dengan dari non-elit partai (Prihatini, 2019). Perempuan Indonesia mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam politik elektoral, tetapi keberhasilan ini tidak dialokasikan secara proporsional, sehingga penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan perempuan dalam pemilu secara keseluruhan dan mendistribusikan kembali keberhasilan tersebut kepada perempuan yang lebih beragam.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan metode campuran, dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Metode kuantitatif terdiri dari survei non-eksperimental terhadap sejumlah kecil politisi perempuan. Metode kualitatif meliputi wawancara informan kunci dan diskusi kelompok terfokus dengan kandidat politik perempuan. Metode ini juga mencakup wawancara dengan para pemangku

kepentingan utama dan para ahli dalam lanskap politik di Indonesia, termasuk pejabat pemerintah, peneliti gender dan politik, dan aktivis LSM lokal. Ketiga metode pengumpulan data ini memungkinkan adanya triangulasi hasil dengan data kuantitatif dari survei, data kualitatif dari wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, serta tinjauan literatur.

Dalam survei ini, para calon, kandidat yang sedang menjabat, dan mantan kandidat di Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara ditanyai mengenai jenis kelamin, agama, pendapatan, pendidikan, tempat tinggal, status keluarga, dan lain-lain. Survei ini mengisolasi beberapa faktor demografis utama seperti jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendapatan, pendidikan, partai, dan agama, serta keberhasilan politik peserta dan ambisi politik jangka pendek. Hal ini memungkinkan kami untuk melakukan dua regresi linier: satu mengukur hubungan antara faktor demografis dan ambisi atau antusiasme kandidat, dan satu lagi mengukur hubungan antara faktor demografis dan keberhasilan pemilu kandidat. Kami membandingkan faktor-faktor yang disoroti oleh regresi dengan faktor-faktor yang diangkat dalam wawancara untuk menentukan faktor apa yang paling berdampak negatif terhadap perempuan, dengan mekanisme apa faktor-faktor tersebut, dan apa yang dapat dilakukan untuk menguranginya.

Hambatan Keterwakilan Perempuan di Indonesia

Hukum di Indonesia mewajibkan partai untuk mencalonkan setidaknya 30% kandidat perempuan untuk setiap posisi, dan banyak partai yang kesulitan untuk memenuhi kuota tersebut. Kandidat perempuan yang diwawancarai menjelaskan bahwa ia dimasukkan ke dalam surat suara tanpa sepengetahuannya oleh pamannya yang partainya membutuhkan lebih banyak kandidat perempuan. Dengan demikian, ketika seorang perempuan menjadi bagian dari partai politik, hambatan untuk mencalonkan diri menjadi sangat rendah, meskipun hambatan untuk mendapatkan dukungan partai dan keberhasilan pemilu tetap tinggi. Dampak usia beragam menunjukkan bahwa kandidat yang lebih tua lebih antusias, tetapi usia tidak signifikan terhadap keberhasilan.

Di tingkat nasional, tidak ada agama yang menunjukkan tingkat antusiasme yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan agama lainnya. Namun di tingkat provinsi, afiliasi agama menjadi faktor yang signifikan, kandidat Protestan di Maluku dan kandidat Protestan atau Katolik di Nusa Tenggara Timur menunjukkan tingkat antusiasme yang jauh lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan mereka yang beragama Islam. Secara keseluruhan, agama memang menunjukkan dampak yang besar terhadap kesuksesan politik. Terdapat korelasi antara menjadi anggota agama mayoritas di provinsi dengan keberhasilan meraih jabatan. Selain itu, secara keseluruhan, kandidat Katolik tampaknya memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih dibandingkan dengan anggota agama lain. Hal ini berkorelasi dengan temuan kualitatif yang menunjukkan bahwa banyak kandidat memulai karirnya di organisasi keagamaan dan bahwa kelompok dan organisasi keagamaan dapat menjadi bagian penting dari jaringan kandidat. Oleh karena itu, korelasi antara agama dan keberhasilan politik dapat menjadi wawasan tentang pentingnya kualitas jaringan pendukung kandidat, dan menyiratkan bahwa ada sesuatu tentang jaringan pendukung kandidat Katolik yang memberi mereka keunggulan dalam politik elektoral.

Pengujian juga mengindikasikan bahwa status pernikahan memiliki dampak yang lebih kecil terhadap antusiasme para kandidat dibandingkan dengan kesuksesan mereka. Status hubungan terbaik yang dapat dimiliki seorang kandidat saat mencalonkan diri adalah menikah, sementara status bercerai atau lajang adalah yang terburuk untuk meraih jabatan politik. Hal ini sejalan dengan laporan beberapa kandidat perempuan bahwa mereka menjadi sasaran rumor dan pengawasan ekstra ketika pemilih mengetahui bahwa mereka belum menikah atau bercerai. Beberapa kandidat melaporkan bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam berkampanye karena mereka tidak merasa nyaman atau diterima di ruang-ruang tertentu sebagai perempuan lajang. Namun, analisis ini juga menunjukkan bahwa laki-laki juga menghadapi tekanan untuk menikah, mungkin karena pernikahan membawa konotasi kehormatan atau kedewasaan. Namun, pada saat yang sama ketika bercerai mengurangi peluang seseorang untuk sukses, hal ini juga berkorelasi dengan peningkatan antusiasme, mungkin karena, meskipun pemilih mungkin tidak menyetujui

kandidat yang bercerai, perceraian memberikan kebebasan yang lebih besar dari tanggung jawab dan kontrol yang lebih besar terhadap keuangan mereka dibandingkan ketika menikah. Secara keseluruhan, pernikahan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan kandidat secara keseluruhan dan antusiasme dalam kasus-kasus tertentu.

Sementara perempuan dalam kelompok survei telah mencapai jabatan sebelumnya, tidak ada perempuan dalam kelompok wawancara yang telah mencapai jabatan, meskipun semua pernah mencalonkan diri untuk jabatan dan banyak yang berencana untuk mencalonkan diri lagi pada pemilu 2024. Hasil dari analisis data kuantitatif, studi literatur, dan wawancara memperlihatkan bahwa jaringan sosial sangat penting bagi keberhasilan politik. Temuan kuantitatif menguatkan hal tersebut, dengan menyoroti pentingnya jaringan keagamaan secara khusus. Perbedaan antara dampak variabel terhadap antusiasme dan keberhasilan juga menunjukkan faktor mana yang menghambat kemampuan seseorang untuk mencalonkan diri dan faktor mana yang membuat seseorang cenderung tidak mendapatkan dukungan dari partai dan pemilih yang dibutuhkan untuk menang.

Seperti yang telah ditekankan sebelumnya, salah satu temuan utama dalam diskusi kelompok terfokus dan wawancara adalah pentingnya jaringan sosial dalam keterlibatan dan kesuksesan politik. Selain itu, sumber daya politik termasuk akses ke modal finansial, pengetahuan tentang sistem politik, dan materi juga diulang-ulang oleh banyak narasumber yang diwawancarai. Keanggotaan partai, memiliki keluarga di bidang politik, pendapatan, dan tingkat pendidikan, secara statistik tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap antusiasme maupun kesuksesan. Di Nusa Tenggara Timur, pendidikan berkorelasi secara signifikan dengan tingkat antusiasme yang lebih tinggi. Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat partisipasi sekolah menengah yang paling rendah di antara ketiga wilayah yang diuji, dengan hanya 61% anak muda yang memenuhi syarat yang terdaftar dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 79% (PDSPK Kemdikbud, 2016).

Banyak caleg mengatakan bahwa mereka merasa diadu domba dengan perempuan lain, dan bahwa konstituen mereka sering kali tumpang tindih, sehingga mereka tidak memiliki banyak ruang untuk bekerja sama. Namun, di antara beberapa orang yang diwawancarai di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara, kerja sama lebih ditekankan daripada persaingan, dan mereka merasa mendapat manfaat dari bekerja sama dengan caleg perempuan lainnya. Kerja sama, sebagaimana didefinisikan oleh narasumber, termasuk berbagi akses ke sumber daya seperti printer dan berbagi transportasi saat berkampanye, serta mengembangkan jaringan sosial dengan kandidat perempuan lain lintas partai.

Isu Gender dan Anak

Hampir semua perempuan berfokus pada isu-isu perempuan dan anak ketika mencalonkan diri, biasanya dengan menargetkan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Isu-isu lain yang menjadi sasaran termasuk penekanan pada literasi dan peningkatan usaha kecil perempuan, serta isu-isu lingkungan. Namun, mengingat sekitar sepertiga perempuan direkrut ke partai politik dan bukannya mencari cara untuk terlibat dalam politik itu sendiri, maka fokus pada isu-isu tertentu masih terbatas.

Kandidat perempuan perlu untuk melakukan jajak pendapat di daerah untuk isu-isu politik yang paling menonjol yang berfokus pada perempuan dan kontekstualisasi untuk daerah setempat. Meskipun perempuan yang diwawancarai mengakui bahwa mereka telah meluangkan waktu dan sumber daya untuk berkampanye, banyak dari mereka yang merasa dikesampingkan dan dukungan internal partai terhadap mereka sangat terbatas. Caleg perempuan ingin partai politik menghargai perempuan lebih dari sekadar memenuhi persyaratan kuota. Kandidat perempuan memerlukan dukungan seperti apa yang dapat mereka harapkan dari partai, dan bentuk dukungan partai yang paling berdampak akan meningkatkan daya tawar perempuan terhadap pimpinan partai, dan membantu memperbaiki informasi antara kandidat laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh perempuan yang direkrut dan bukan karena ingin berpolitik.

Kekuatan Jaringan

Dukungan melalui jaringan sosial menjadi kekuatan signifikan di antara semua kandidat yang menjadi responden wawancara. Penelitian kuantitatif juga memperlihatkan bahwa agama memiliki dampak yang tinggi terhadap antusiasme para kandidat untuk terlibat dalam politik dan keberhasilan politik mereka, dan wawancara kandidat berfungsi sebagai penjelasan mengapa agama menjadi faktor yang penting. Banyak kandidat yang paling sukses memiliki komunitas yang mendukung mereka, baik dari kalangan agama maupun aktivis dan organisasi masyarakat sipil yang lebih sekuler. Ketika digabungkan dengan dukungan dari partai, para peserta yang lebih sukses (menerima porsi suara yang signifikan) menyebutkan hal ini sebagai faktor utama. Meskipun dalam banyak kasus, dukungan ini datang dalam bentuk dukungan materi, seperti materi dan uang yang disumbangkan oleh teman dan keluarga, kontribusi non-fisik pun membuat perbedaan besar. Analisis kuantitatif juga menunjukkan bahwa pendapatan para kandidat tidak terlalu berpengaruh terhadap kesuksesan politik mereka. Para kandidat yang mengakses sumber daya material melalui komunitas dan jaringan mereka dapat menjelaskan alasannya. Dalam banyak kasus, memiliki akses ke jaringan memastikan suara dari sejumlah besar konstituen potensial, baik melalui gereja, masjid, atau jaringan organisasi atau keluarga mereka.

Selain itu, bahkan ketika organisasi keagamaan tidak secara eksplisit memberikan dukungan finansial kepada para kandidat, para kandidat menekankan dukungan elektoral dan dukungan komunitas yang diberikan oleh jaringan mereka. Bahkan ketika lembaga-lembaga keagamaan tidak dapat atau tidak mau memberikan dukungan materi atau dukungan kepada para kandidat, keanggotaan seorang kandidat dalam lembaga tersebut memberikan mereka hak untuk mendapatkan publisitas gratis dalam bentuk diikutsertakan dalam doa bersama dan sejenisnya. Bagi banyak orang, memiliki anggota keluarga dalam politik berarti mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam partai politik. Selain itu, memiliki keluarga di dunia politik berarti akses yang lebih besar ke jaringan politik dan dukungan partai. Dengan demikian, memiliki keluarga elit berarti

memiliki koneksi yang lebih baik dengan partai politik. Sebagian besar orang yang diwawancarai yang memiliki keluarga di dunia politik bergabung dengan partai yang sama dengan keluarga mereka, tetapi ada juga yang tidak. Dalam satu kasus seorang caleg dari Sumatera Utara, seluruh anggota keluarga yang diwawancarai berkiprah di partai yang berbeda, dan ia tidak bergabung dengan partai saudara laki-lakinya maupun ayahnya. Ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa keakraban dengan sistem partai yang diperoleh melalui interaksi dengan keluarga dalam politik dapat menguntungkan seorang kandidat. Analisis kuantitatif tidak menyoroti hubungan antara memiliki keluarga dalam politik dan kesuksesan politik, kemungkinan karena kebingungan dalam mendefinisikan ikatan keluarga.

Sumber Daya Politik

Ada empat kategori utama sumber daya politik yang menurut perempuan berguna saat mencalonkan diri: modal finansial, pengetahuan politik, sumber daya sosial, dan materi. Modal finansial merupakan sumber daya yang paling langsung berguna bagi para kandidat politik. Ketika ditanya, sebagian besar perempuan akan menjawab awalnya dengan kebutuhan pembiayaan yang lebih besar, dan kemudian diikuti dengan sumber daya lain yang menurut mereka berguna ketika mencalonkan diri. Banyak peserta mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh para pemilih yang meminta atau mengharapkan sumbangan materi sebagai imbalan atas pemberian suara. Kandidat dari Maluku menyebutkan bahwa ia membayar semua biaya kampanyenya. Sumber daya finansial adalah kunci keberhasilan pemilu dan kampanye.

Pengetahuan politik kandidat yang baru pertama kali mencalonkan diri menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan negosiasi yang besar di dalam partai mereka, dan tidak dapat memilih daerah pemilihan atau posisi dalam daftar calon, namun mendapatkan pengaruh politik seiring dengan bertambahnya usia. Banyak kandidat merasa bahwa pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik membantu mereka dalam kampanye, baik dengan mempelajari wawasan dari politisi lain dan mentor, menempuh pendidikan yang berkaitan dengan bidang

tersebut (seperti sekolah hukum), atau mendapatkan pengetahuan yang lebih luas melalui pekerjaan mereka sebagai aktivis dan organisasi masyarakat sipil. Para mentor secara khusus memberikan dukungan dan manfaat yang signifikan bagi kandidat politik perempuan. Beberapa orang yang diwawancarai juga menyebutkan kesulitan-kesulitan dalam proses pemilu itu sendiri. Salah satu kandidat dalam diskusi kelompok terfokus di Nusa Tenggara Timur menyebutkan kurangnya transparansi dari partainya sebagai rintangan utama.

Selain sumber daya sosial yang disediakan oleh keluarga, kelompok agama, dan koneksi lokal, para narasumber yang diwawancarai juga menekankan berbagai cara yang digunakan jaringan sosial untuk memberikan nasihat, dorongan, dan koordinasi. Khususnya di Nusa Tenggara Timur, beberapa kandidat dan seorang ahli menyebutkan manfaat bekerja lintas partai bagi kandidat perempuan. Dengan demikian, terlepas dari politik kepartaian dan persaingan di antara perempuan yang berlomba-lomba memperebutkan jabatan politik, banyak perempuan yang mencari kerja sama.

Selain modal finansial, barang material adalah sumber daya politik yang paling banyak disebutkan berikutnya. Seorang kandidat di Sumatera Utara didukung oleh teman-temannya, yang menyediakan akses ke printer, yang darinya ia dapat mencetak materi promosi pemilu. Banyak kandidat lain yang memiliki keluarga dan teman yang membantu menyediakan materi tambahan. Meskipun sebagian besar orang yang diwawancarai menyebutkan bahwa partai politik mereka tidak memberikan dukungan finansial (kecuali sesekali untuk membayar saksi), beberapa kandidat menyebutkan bahwa partai memberikan mereka barang-barang seperti peralatan, alat peraga kampanye, spanduk, kalender, kartu nama, bendera, liontin, pakaian. Semua barang tersebut dimaksudkan untuk diberikan kepada pemilih yang, karena masih maraknya jual beli suara di Indonesia, sering mengharapkan kompensasi dari kandidat politik terutama ketika mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan kandidat. Seorang caleg perempuan lainnya dari Sumatera Utara menyebutkan bahwa ia memberikan sarung dan jilbab kepada para pemilih sebagai bagian dari kampanye politiknya.

Masalah Sistem Pemilu

Masalah sistem yang paling banyak dibicarakan oleh para narasumber adalah kurangnya dukungan finansial. Meskipun partai menyediakan kerangka kerja bagi perempuan untuk mencalonkan diri, hanya sekitar separuh dari perempuan yang diwawancarai yang menerima dukungan finansial dari partai mereka. Mayoritas narasumber yang diwawancarai hanya menerima bantuan dana untuk membayar saksi pemilu, atau partai sendiri yang menyediakan saksi untuk mereka. Hanya tiga perempuan yang menyebutkan menerima dukungan keuangan dari partai mereka untuk hal-hal selain saksi. Sebagian besar perempuan yang diwawancarai menginginkan dana untuk membeli biaya kampanye dasar, termasuk biaya transportasi, biaya material, dan makanan selama pertemuan publik dan sesi kampanye. Banyak juga yang berkomentar tentang bagaimana pemilih mengharapkan para kandidat memberikan insentif untuk memilih kandidat tertentu. Jika perempuan tidak memberikan hadiah kecil kepada pemilih, mereka mengatakan bahwa konstituen cenderung tidak akan memilih mereka. Dengan demikian, politik uang merupakan isu yang sering disebutkan dalam kampanye.

Partai politik sering kali menyediakan saksi di tempat pemungutan suara, tetapi saksi tersebut tidak ada untuk melindungi suara setiap kandidat. Banyak kandidat yang menyebutkan bahwa mereka merasa telah terjadi kecurangan dan jual beli suara, dan dalam beberapa kasus, mereka seharusnya memenangkan pemilu. Saksi partai biasanya bekerja bukan untuk kepentingan semua anggota partai, tetapi untuk kepentingan satu kandidat: baik kandidat yang disukai partai atau kandidat yang membayar bayaran mereka. Para saksi akan mengubah total suara untuk menguntungkan kandidat pilihan mereka, sering kali dengan mengorbankan anggota lain dari partai yang sama. Beberapa orang yang diwawancarai merasa suara mereka hilang, diubah, atau tidak dimasukkan, atau total suara mereka berubah ketika dijumlahkan di beberapa tempat pemungutan suara. Para kandidat terkadang menyadari hal ini, tetapi tidak mengajukan tuntutan

karena mereka merasa hal itu akan merusak persepsi publik terhadap partai mereka dan kemampuan mereka sendiri untuk berhasil dalam partai mereka.

Banyak caleg yang melaporkan bahwa mereka tidak mengetahui prevalensi pencurian suara sebelum suara mereka dicuri pada pemilu pertama mereka. Para kandidat melaporkan bahwa saksi mereka tidak dapat dipercaya, tidak diperlengkapi dengan baik untuk menjalankan tugas mereka, atau terlalu sedikit untuk mempertahankan suara mereka. Ketika anggota keluarga atau teman dipekerjakan sebagai saksi, mereka sering tidak memahami peran yang seharusnya mereka mainkan atau apa yang diizinkan untuk mereka lakukan

Peran saksi dalam sistem di Indonesia; siapa pun diizinkan untuk menyaksikan proses penghitungan suara, tetapi untuk menjadi saksi pemilu resmi, mereka harus memiliki surat dari ketua partai lokal yang menyatakan bahwa mereka adalah saksi resmi. Hanya ada satu saksi resmi per partai per tempat pemungutan suara. Sistem pemungutan suara daftar terbuka di Indonesia menyebabkan seorang kandidat dapat menang apabila partainya mendapatkan suara terbanyak dibandingkan dengan partai-partai lain, dan kandidat tersebut harus mendapatkan suara terbanyak dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain di partainya. Artinya, persaingan antarcaleg dari partai yang sama sama ketatnya dengan persaingan antarpartai.

Rekomendasi Dan Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan untuk kandidat perempuan agar dapat fokus pada variabel signifikan yang dapat mempengaruhi kemenangan mereka dalam pemilu, variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jaringan

Mengingat pentingnya komunitas dan jaringan sosial bagi keberhasilan kampanye seorang kandidat, akan sangat berguna bagi para calon politisi untuk mempelajari cara-cara untuk menemukan dan membangun jaringan dan koneksi yang secara politis dapat bermanfaat bagi mereka. Ini dapat mencakup kelompok-kelompok keagamaan, hobi, amal, atau mahasiswa.

Mengingat cara-cara spesifik jaringan sosial beroperasi di berbagai provinsi dan wilayah, akan sangat membantu untuk memahami bagaimana kekerabatan sosial dibangun di wilayah tempat mereka berlatih, dan bagaimana hal-hal spesifik tersebut dapat dipahami dan digunakan dalam kampanye kandidat mereka. Ini berarti di beberapa daerah, pelatihan dapat mencakup bagaimana menggunakan media sosial untuk berkampanye dan bagaimana cara mendapatkan pengikut, sedangkan di daerah lain dapat lebih fokus pada jaringan tradisional. Kandidat perempuan juga harus menekankan bagaimana memanfaatkan jaringan yang sudah ada; bagaimana mengenali jaringan informal dan memanfaatkannya; dan manfaat apa yang bisa diberikan oleh jaringan yang sudah ada meskipun tidak secara eksplisit bersifat politis.

2. Saksi Pemilu

Kandidat perlu memahami perbedaan antara saksi resmi dan tidak resmi, dan mampu mengkomunikasikan kewenangan seorang saksi kepada saksi-saksi mereka. Oleh karena itu, akan sangat membantu untuk menyertakan saran tentang bagaimana mencegah pencurian suara. Para kandidat juga harus melobi para pemimpin partai lokal untuk mendapatkan surat yang mengizinkan saksi mereka dianggap sebagai saksi resmi. Mereka mungkin dapat meyakinkan ketua partai yang enggan untuk memberikan status saksi resmi kepada mereka dengan menawarkan untuk membayar sendiri saksi tersebut, daripada meminta partai menanggung biaya. Para kandidat juga harus berusaha agar para saksi mereka dilatih. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan program pelatihan saksi beberapa minggu sebelum pemilu, namun pelatihan ini biasanya dilakukan secara langsung, sehingga sulit diakses, dan memerlukan pendaftaran, yang hanya dapat dilakukan melalui ketua partai. Partai-partai juga sering kali memiliki cara mereka sendiri untuk melatih saksi, sering kali secara virtual atau melalui aplikasi, yang dapat digunakan oleh para kandidat untuk mendaftarkan saksi mereka.

3. Isu khusus gender perempuan

Pengalaman para kandidat sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang masing-masing perempuan. Pengalaman mereka yang berbeda membuat sulit untuk menyimpulkan apa yang dibutuhkan oleh semua caleg perempuan, meskipun ada tren regional seperti kemampuan yang berbeda untuk bepergian sendirian di malam hari, dan prevalensi jaringan agama yang berbeda. Hal ini akan berguna bagi para caleg perempuan di berbagai wilayah dan mengatasi isu-isu spesifik yang muncul secara lokal. Berbekal data canvassing tentang isu-isu regional akan memungkinkan para kandidat perempuan untuk menentukan isu-isu yang relevan untuk kampanye yang sukses. Mengingat bahwa kandidat perempuan lebih banyak berfokus pada isu-isu perempuan dan anak-anak, akan sangat berguna untuk memperluas program dengan memasukkan cara menargetkan, dan demografi utama yang tertarik pada perempuan dan kesejahteraan anak. Untuk memastikan bahwa kandidat perempuan dapat berhasil menjangkau target demografi mereka, perempuan akan dapat mengklaim lebih banyak ruang dalam politik dan, setelah itu, mereka dapat mendiversifikasi isu-isu kampanye mereka dan mengembangkan kampanye dan kebijakan pemerintahan yang lebih spesifik.

4. Penggalangan dana kampanye

Mengingat kesenjangan kekayaan antar gender di Indonesia yang tinggi, perempuan memiliki pendapatan yang lebih rendah dan seringkali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dana yang diperlukan. Akan sangat berguna untuk memberikan pelatihan mengenai penggalangan dana dan penganggaran kampanye, serta pengeluaran apa yang memiliki dampak paling besar; menurut kesaksian para kandidat, hal tersebut mencakup saksi yang tepat, hadiah kecil namun bermakna bagi pemilih, dan di Maluku dan Nusa Tenggara Timur, perjalanan. Mungkin juga berguna untuk memenuhi kebutuhan demografi dan komunitas tertentu. Beberapa kandidat berbicara tentang bagaimana mereka telah dilatih untuk menggunakan media sosial sebagai bagian dari platform pemilu mereka, tetapi karena mereka menargetkan masyarakat pedesaan, mereka harus mendesain ulang kampanye mereka agar lebih berteknologi rendah.

5. Kolaborasi dengan kandidat lain

Kandidat sering kali harus berkompetisi di dalam partai mereka, terutama jika mereka ingin meraih jabatan tertentu atau mencalonkan diri di daerah pemilihan tertentu. Dengan demikian, mereka dapat mengambil manfaat dari jaringan dengan para kandidat yang bekerja di daerah pemilihan yang sama, terutama kandidat dari partai lain. Akan sangat membantu bagi peserta jika pelatihan mencakup penekanan yang lebih besar pada pembangunan jaringan dan koordinasi komunitas antara peserta perempuan dan juga konstituen perempuan jika belum disertakan. Koordinasi ini dapat mencakup berbagi sumber daya seperti transportasi, akses ke printer, dan pengetahuan tentang lanskap politik. Berbagi sumber daya akan memungkinkan para kandidat untuk meregangkan pendanaan mereka yang terbatas dan menutupi kesenjangan sumber daya antara rekan-rekan mereka yang lebih senior dan laki-laki.

Kandidat perempuan di Maluku, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur menghadapi beberapa hambatan ketika mencalonkan diri untuk jabatan politik. Sejauh ini, tidak semua hambatan tersebut diketahui atau ditangani secara umum. Banyak yang menyatakan pentingnya menggunakan jaringan sosial dan agama serta komunitas mereka untuk mendapatkan keterampilan, dikenal, dan menutupi kekurangan sumber daya dalam kampanye mereka.

Dukungan bagi perempuan selama tahap persiapan kampanye mereka harus memanfaatkan jaringan komunitas dan sumber daya material mereka, dan terdiri dari keterampilan berjejaring, perencanaan keuangan, dan media sosial. Dukungan tersebut juga harus mencakup pelatihan yang lebih rinci tentang proses pemilu di daerah mereka, terutama bagaimana melindungi suara mereka. Dari para kandidat perempuan yang mengorganisir kampanye mereka, banyak yang kalah dalam pemilu bukan karena kurangnya keterampilan atau usaha, melainkan karena politik internal partai dan dugaan pencurian suara. Oleh karena itu, persiapan untuk hari pemilihan sama pentingnya dengan persiapan kampanye itu sendiri. Oleh karena itu, kandidat perempuan harus menekankan pada bagaimana mengelola sumber

daya mereka di semua tahapan proses pemilu dan bagaimana menyesuaikan penggunaan sumber daya mereka dengan keadaan di daerah pemilihan mereka, bukan pada perolehan keterampilan khusus yang mungkin tidak mempengaruhi hasil pemilu di banyak daerah pemilihan.

Referensi

- Aspinall, Edward, Sally White, and Amalinda Savirani. (2021) "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?" *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1: 3-27, <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1868103421989720>;
- Prihatini, Ella S. (May-June 2019) "Women's Views and Experiences of Accessing National Parliament: Evidence from Indonesia." *Women's Studies International Forum* 74 Pages 84-90. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.03.001>
- Prihatini, Ella S. (January 1, 2019): "Women Who Win in Indonesia: The Impact of Age, Experience, and List Position." *Women's Studies International Forum* 72 40–46.
- Perdana, Aditya, and Ben Hillman. (May 2020): "Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia." *Asia & the Pacific Policy Studies* 7, no. 2. 158–70. <https://doi.org/10.1002/app5.299>.
- Wieringa, Saskia. (2006) "Islamization in Indonesia: Women Activists' Discourses." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 32, no. 1: 1-8, <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/505274>.
- Bayo, Longgina Novadona. (April 2021) "Women Who Persist: Pathways to Power in Eastern Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1: 93–115. <https://doi.org/10.1177/1868103421989712>.
- Perdana, Aditya, and Ben Hillman. (May 2020) "Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia." *Asia & the Pacific Policy Studies* 7, no. 2: 158–70. <https://doi.org/10.1002/app5.299>.
- Indonesia. PDSPK Kemdikbud. (2016). (rep.). *STATISTIK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)*. Jakarta. Retrieved from: <https://indearchipel.com/2018/03/13onderwijs-indonesie/#voetnoten>